

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam politik. Komunikasi dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan komunikasi dan politik dianggap sangat erat dan istimewa sebab berada dalam area politik. Metode komunikasi politik menduduki fungsi yang fundamental. Pendekatan komunikasi mampu memberikan pandangan yang jauh terkait dengan perilaku politik. Komunikasi politik ini merupakan salah satu taktik dalam membangun citra politik. Citra politik ini berkaitan erat dengan pendapat, sebab pendapat ini akan muncul melalui adanya citra politik. Komunikasi seringkali dikaitkan dengan penyampaian pesan baik verbal maupun non verbal. Komunikasi politik adalah penyampaian ide atau pesan yang berkaitan dengan politik dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan agar memiliki pemahaman yang sama.¹ Komunikasi politik dapat mempengaruhi masyarakat dan juga pemerintah dalam sebuah sistem politik

Komunikasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan demokratisasi yaitu adanya saling mempengaruhi dalam perebutan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan maupun memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik yang posisinya sebagai komunikator. Komunikasi politik ini tidak dapat dipisahkan dengan dinamika politik saat komunikasi itu berlangsung. Komunikasi politik merupakan fenomena yang cukup menarik untuk dikaji dalam sistem politik, sebab pihak pemegang kekuasaan yaitu eksekutif dan legislative memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan-kebijakan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan untuk menjadi kebijakan publik. Komunikasi ini berkaitan dengan perencanaan dan juga pelaksanaan.²

¹K Muchtar, 'Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. Jurnal Online UPN Veteran Yogyakarta', *Jurnal Online UPN Veteran Yogyakarta. Jurnal Online UPN Veteran Yogyakarta*, 14.2 (2016), 137-47 <<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2127/1865>>.

²Zikri Fachrul Nurhadi, 'Kajian Tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi', 1, 2017, 90-91 <journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/235/295>.

Komunikasi menjadi faktor utama yang sangat menentukan dalam proses politik yang dilakukan oleh elit kuasa yang kedudukannya sebagai komunikator. Komunikasi antara elit kuasa dengan masyarakat sangatlah penting dalam sistem politik. Komunikasi politik dianggap sebagai faktor penunjang dalam proses pembangunan masyarakat, hingga akhirnya masyarakat menganggap memiliki hubungan atau berinteraksi dengan elit kuasa, hal inilah menjadikan komunikasi politik menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan.³ Selain itu komunikasi politik juga erat kaitannya dengan partisipasi politik yaitu keikutsertaan semua pihak baik komunikator maupun komunikan dalam merumuskan kebijakan.

Komunikasi politik didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan penting yang berasal dari politikus kepada khalayak umum ataupun sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya peraturan ataupun kebijakan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁴ Menurut Meadow komunikasi politik mempunyai arti setiap ide atau pesan yang disampaikan sesuai dengan keadaan politik dan juga rasional dengan sistem politik.⁵ Sedangkan Jack Plano mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan penyebaran pesan yang berkaitan dengan fungsi sistem politik, selain itu juga melibatkan unsur komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan dll.⁶ Lain halnya dengan Alwi Dahlan yang mengatakan bahwa komunikasi politik adalah pengamatan pada tingkah laku dan aktivitas komunikasi yang sifatnya politik dan akan berpengaruh kepada tingkah laku politik.⁷ Dari beberapa pendapat para ahli terkait dengan definisi komunikasi politik maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan aktivitas penyampaian pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada

³Carlos Del Valle Rojas, "Political Communication," *The Routledge Handbook to the Political Economy and Governance of the Americas*, 2020, 458–62, <https://doi.org/10.4324/9781351138444-45>.

⁴Aa Bambang, "Demokrasi, Komunikasi Politik Indonesia Dan Globalisasi," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 19, no. 2 (2015): 303–16.

⁵"Political Communication Research in the 1980s - Meadow - 1985 - Journal of Communication - Wiley Online Library," n.d.

⁶Mirza Shahreza, "Hakekat, Filsafat Dan Sejarah Komunikasi Politik," 2018, 1–34, <https://doi.org/10.31227/osf.io/hmvr>.

⁷Ida Ayu Paramitha, "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka," *Convention Center Di Kota Tegal*, 2017, 6–37.

komunikasikan terkait dengan dunia politik agar dapat mempengaruhi perasaan maupun tingkah laku komunikan.

Komunikasi politik merupakan permasalahan yang sangat urgen dalam proses penghubungan antara pemerintah dengan khalayak umum. Komunikasi politik berkaitan erat dengan aktivasi sosial, perolehan dukungan dan juga integrasi politik. Mobilisasi politik juga berkaitan erat dengan adanya kampanye, propaganda, retorika politik, negosiasi, dan pembentukan opini publik. Hal itulah yang menjadikan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir khalayak umum. Komunikasi politik bukanlah peran utama yang berdiri sendiri namun ada 6 fungsi dalam proses komunikasi politik yaitu, sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penyusunan peraturan, implementasi peraturan dan juga pengambilan keputusan. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi ada pada setiap fungsi sistem politik.⁸

Kehidupan demokrasi yang ada seperti di Indonesia saat ini, partai politik adalah instrument yang harus ada pada suatu Negara yang menerapkan sistem demokrasi. Partai politik merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang sifatnya nasional yang didirikan oleh sekelompok masyarakat dengan sukarela karena adanya kesamaan kehendak dan juga tujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam suatu partai.⁹ Ketika menjalankan proses komunikasi politik pada suatu Negara yang berlandaskan demokrasi maka partai politik menjadi peran utama. Adanya partai politik pada sistem politik yang demokratis memiliki fungsi yang urgen. Sistem politik ini tidak hanya sebagai institusi kelembagaan namun sebagai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Seperti halnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibentuk setelah presiden Soeharto lengser. Partai politik PKB ini didirikan oleh Abdurahman Wahid dengan didukung oleh KH

⁸ Zaenal Mukarom, "ZM_Komunikasi_Politik.Pdf," n.d.

⁹ Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008, 282.

¹⁰ Djoko Waluyo, "Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital," *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2019): 160–67, <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>.

Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri dan KH .Muchith Muzadi.¹¹ PKB tergolong dalam partai politik Islam, yang dilahirkan dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Bahkan PKB dianggap sebagai sayap politik dari organisasi masyarakat NU.¹² Berdirinya PKB dilandaskan pada sifat kejuangan, terbuka, kebangsaan dan demokratis. Selain itu PKB juga mengusung adanya nilai-nilai demokratis dan senantiasa menjunjung tinggi nasionalisme. PKB tidak hanya menjadi tempat penjangaran aspirasi bagi masyarakat Nadliyin, namun juga terbuka untuk masyarakat umum.¹³

Sama halnya dengan Fraksi PKB Kabupaten Jepara yang senantiasa mengayomi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keisalaman serta menjadi wadah dalam penjangaran aspirasi. Dibuktikan pada undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DPRD, yang memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja yang dilakukan secara rutin. Pada kegiatan tersebut anggota DPRD menampung dan melakukan tindakan terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.¹⁴ Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan reses. Pada kegiatan tersebut anggota DPRD menampung dan melakukan tindakan terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.¹⁵

Salah satu strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama dengan masyarakat melalui kegiatan reses. Dengan diadakannya kegiatan reses ini maka anggota dewan akan mengetahui kondisi masyarakat setempat dengan harapan program yang dibuat oleh anggota dewan dapat optimal sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan reses adalah masa

¹¹ Tim Divaro Yugha, 'Profil Partai Politik Peserta Pemilu', (Jakarta; Erlangga, 2014),34.

¹² Fanny Dwi et al., "POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2000-2015" 10, no. 3 (2021).

¹³ Nevy Rusmarina Dewi and Ahmad Sholahuddin, "Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia: Studi Kasus Papua," *Politea* 3, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7255>.

¹⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

¹⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

istirahat namun banyak yang memaknai reses sebagai penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan. Kegiatan ini dapat dilakukan diluar gedung maupun wilayah dapil. Waktu pelaksanaan kegiatan ini mengikuti waktu sidang yaitu sebanyak tiga kali dalam satu tahun, 14 kali dalam kurun waktu 5 tahun sesuai masa jabatan anggota dewan.¹⁶

Adanya kegiatan reses ini juga diharapkan kinerja anggota dewan lebih maksimal. Selain itu dilakukannya reses adalah sebagai sikap tanggung jawab anggota dewan terhadap masyarakat daerah pilihan dan dijadikan sebagai pengaduan yang terjadi diwilayahnya. Reses merupakan kegiatan berskala panjang yang dilakukan secara rutin oleh anggota dewan pusat, provinsi maupun kabupaten. Misi dari adanya kegiatan reses tidak lain adalah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat. Reses merupakan salah satu penyampaian aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, reses ini dapat dilakukan dengan cara anggota dewan mengunjungi daerah pilihan dengan musyawarah rencana pembangunan yang biasa disingkat musrenbang. Selain itu juga dapat melalui Bupati ataupun DPC/DPD partai. Aspirasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan dalam proses pembangunan. Bentuk-bentuk pesan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik.¹⁷

Seperti halnya pada UU No 27 Tahun 2009 pasal 300, berisi tentang kewajiban anggota dewan untuk ^{bertemu} dengan peserta reses yang diagendakan secara rutin, setelah itu hasil dari pertemuan tersebut dilaporkan dalam bentuk tertulis kepada fraksinya. Seorang anggota dewan harus mempertanggungjawabkan secara moral dan politis ketika kegiatan reses dilaksanakan. Pada kegiatan ini anggota dewan menyampaikan apa yang sudah dilakukan serta membahas strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas programnya. Pada umumnya kegiatan reses dilakukan oleh anggota dewan sebagai berikut : 1). Rapat dengan tujuan membahas agenda pembekalan

¹⁶ Kacung Marijan, 'Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru', (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), 53.

¹⁷ Eko Priyo Utomo and Muhammad Iqbal Sultan Hafied Cangara, 'Strategi Komunikasi dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat', *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 2.4 (2013), 351–360.

kegiatan reses misalnya melalui penyusunan schedule, memastikan materi yang akan dibahas, dan memilih pemimpin dalam sebuah kelompok. 2). Menghadiri kegiatan reses untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung.¹⁸ Reses ini mengikutsertakan peserta dari berbagai pihak misal dari kalangan akademisi, politisi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Dengan diadakannya reses fraksi PKB tujuannya agar anggota dewan mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan. Menurut peneliti tema ini sangatlah penting untuk dikaji, sebab memiliki signifikansi sebagai berikut ; *Pertama*, peneliti mengamati strategi komunikasi politik yang digunakan oleh fraksi PKB Kabupaten Jepara. *Kedua*, untuk mendapatkan data perolehan simpati umat muslim dalam kegiatan reses. Adanya deskripsi tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Komunikasi Politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara dalam Memperoleh Simpati Umat Muslim Melalui Kegiatan Reses Tahun 2021**”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada strategi komunikasi politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya yang berhubungan dengan komunikasi politik Fraksi PKB Kabupaten Jepara dalam memperoleh simpati dari umat muslim melalui kegiatan reses tahun 2021 yang dilakukan oleh anggota dewan bersama dengan seluruh anggota masyarakat. Sedangkan fokus lokasi penelitian ini berada di DPRD Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara dalam melaksanakan komunikasi politik ?
2. Bagaimana upaya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam memperoleh simpati umat muslim melalui kegiatan reses?

¹⁸ Kuncoro Adhi, ‘Gaya Kepemimpinan Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010-2011’, *Bab I*, 2020, 1–16.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara dalam melaksanakan komunikasi politik.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan fraksi PKB dalam memperoleh simpati umat muslim melalui kegiatan reses.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan referensi untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari pokok permasalahan yang dibahas khususnya untuk mahasiswa/i Pemikiran Politik Islam.
 - b. Memperkaya kajian khususnya pada mata kuliah komunikasi politik
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan atau bahan acuan bagi anggota dewan fraksi PKB Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan reses yang dilakukan secara rutin. Agar terciptanya komunikasi politik yang efisien serta menciptakan masyarakat yang sejahtera.
 - b. Menambah pengetahuan terkait dengan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD dan proses-proses politik didalamnya.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini peneliti membagi menjadi 5 bab yang mana antara bab satu dengan bab lainnya akan saling berhubungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menyimpang pada permasalahan yang dibahas sejak awal oleh peneliti. Bagian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;

1) Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdapat beberapa bagian diantaranya yaitu sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan .

2) Bagian Isi

Pada bagian isi ini juga terdapat 3 bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkorelasi sebab antar bab adalah satu kesatuan yang utuh. Dari ketiga bab tersebut diantaranya adalah :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian terkait latar belakang yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang kontingen dengan permasalahan yang sedang dikaji, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan terkait dengan jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Selain itu dalam bab ini dijelaskan pula terkait dengan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan gambaran umum tempat atau lokasi penelitian, menjelaskan deskripsi data penelitian dan analisis data yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan masalah yang dikaji.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara tuntas oleh peneliti. Selain itu juga berisi saran dari penulis dalam proses strategi komunikasi politik yang telah dijalankan oleh fraksi PKB.

3) Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi referensi yang telah digunakan oleh penulis dan juga lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.